

## Mewujudkan Otonomi Daerah yang Berkualitas: Peran Kemantapan Infrastruktur Dasar dalam Mendukung Pembangunan Sosial dan Pengembangan Wilayah Mandiri di Kabupaten Gunung Mas

***Realizing Quality Regional Autonomy: The Role of Stable Basic Infrastructure in Supporting Social Development and the Development of Independent Regions in Gunung Mas Regency***

---

Irwani<sup>1</sup>

Richard<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

email: Irwani@umpr.ac.id

### Abstrak

Kabupaten Gunung Mas, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas, terutama terkait dengan kemantapan infrastruktur dasar. Meskipun upaya perbaikan telah dilakukan, keterbatasan akses terhadap infrastruktur vital seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan masih menghambat pembangunan sosial dan pengembangan wilayah mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan sosial dan pengembangan wilayah yang mandiri di Kabupaten Gunung Mas. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dasar yang belum memadai menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat dan ketergantungan pada bantuan luar daerah. Pemberian infrastruktur yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan daerah. Kesimpulannya, untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas, diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata serta pemberdayaan masyarakat guna mendukung pengembangan wilayah yang mandiri dan berkelanjutan.

---

### Kata Kunci:

Otonomi Daerah  
Infrastruktur Dasar  
Pembangunan Sosial  
Pengembangan Wilayah  
Pemberdayaan Masyarakat

### Keywords:

Regional Autonomi  
Basic Infrastructure  
Social Development  
Regional Development  
Community Empowerments

### Abstract

*Gunung Mas Regency, located in Central Kalimantan Province, faces significant challenges in realizing quality regional autonomy, particularly related to the stability of basic infrastructure. Despite ongoing efforts to improve, limitations in access to essential infrastructure such as roads, clean water, and health facilities hinder social development and the creation of independent regions. This study aims to explore the role of basic infrastructure in supporting social development and the creation of self-sustaining regions in Gunung Mas Regency. The methodology used is a case study with a qualitative approach, involving interviews with relevant stakeholders and secondary data analysis. The findings show that inadequate infrastructure impedes the improvement of the community's quality of life and increases dependence on external aid. Improving infrastructure integrated with local community empowerment is key to accelerating regional development. In conclusion, achieving quality regional autonomy requires policies that focus on equitable infrastructure development and community empowerment to support the creation of self-sustaining and sustainable regions.*

---

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam upaya desentralisasi pemerintahan di Indonesia.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Namun,

realisasi otonomi daerah yang berkualitas masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah yang terisolasi seperti Kabupaten Gunung Mas. Salah satu faktor yang mendasari kesuksesan otonomi daerah adalah kemampuan infrastruktur dasar yang dapat menunjang pembangunan sosial dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Kemampuan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan, sangat penting bagi terciptanya kehidupan yang layak di daerah-daerah yang masih berkembang. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar arus barang, jasa, dan informasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi daerah. Kabupaten Gunung Mas, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tantangan besar terkait infrastruktur, terutama karena kondisi geografis yang berbukit-bukit dan tersebar.

Pembangunan sosial dan pengembangan wilayah mandiri menjadi lebih sulit tanpa adanya infrastruktur yang solid. Misalnya, daerah yang belum terhubung dengan jalan yang baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, pendidikan yang terbatas, serta akses kesehatan yang sangat minim. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik adalah penentu utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Gunung Mas.

Pengembangan wilayah mandiri adalah konsep yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat dengan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Di Kabupaten Gunung Mas, pengembangan wilayah mandiri perlu didorong dengan memastikan adanya akses yang lebih mudah ke fasilitas-fasilitas dasar, seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit. Dengan demikian, masyarakat dapat

mengelola potensi alam dan sumber daya manusia yang ada secara optimal.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur yang tepat. Pada saat yang sama, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pembangunan, baik melalui pengawasan maupun keterlibatan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Infrastruktur dasar juga harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Salah satu indikator penting dalam pengembangan wilayah adalah terciptanya lapangan kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran. Dengan infrastruktur yang memadai, peluang investasi akan semakin terbuka lebar, baik dari investor lokal maupun asing, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Otonomi daerah yang berkualitas tidak hanya mengukur keberhasilan dalam sektor ekonomi, tetapi juga dalam sektor sosial dan kesejahteraan. Pendidikan yang berkualitas dan akses kesehatan yang merata merupakan dua indikator utama dalam mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan otonomi yang mandiri. Kabupaten Gunung Mas membutuhkan upaya ekstra untuk membangun kapasitas sosial yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Banyak proyek infrastruktur yang

hanya berfokus pada pembangunan fisik, namun kurang memperhatikan pemeliharaan dan kelestariannya. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah pusat dapat memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk daerah-daerah yang membutuhkan, seperti Kabupaten Gunung Mas. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dengan memperkuat kemantapan infrastruktur dasar, Kabupaten Gunung Mas dapat bergerak menuju wilayah yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berkualitas. Otonomi daerah yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh aspek pembangunan, baik infrastruktur fisik maupun sosial, diperhatikan secara holistik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Pada tahun 2025, Kabupaten Gunung Mas menghadapi berbagai tantangan signifikan terkait dengan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kemajuan sosial dan pengembangan wilayah mandiri. Kabupaten ini, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, masih mengalami kesenjangan besar dalam hal aksesibilitas dan kemantapan infrastruktur, yang menjadi penghambat utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dan pusat untuk

meningkatkan infrastruktur, kenyataannya banyak fasilitas dasar yang masih terbatas, seperti jalan yang rusak, akses air bersih yang belum merata, serta listrik yang sering kali tidak stabil.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Gunung Mas adalah kondisi jalan yang buruk, terutama di daerah-daerah pedalaman. Meskipun beberapa proyek perbaikan infrastruktur telah dilakukan, tetapi aksesibilitas antar desa dan kecamatan masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada mobilitas barang dan orang, yang pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi lokal. Keterbatasan infrastruktur transportasi juga berkontribusi terhadap rendahnya daya tarik investasi di daerah ini, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan ketergantungan pada sektor-sektor tradisional yang kurang menguntungkan.

Selain itu, masalah akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak juga masih menjadi kendala besar. Banyak desa yang masih mengandalkan sumber air dari sungai yang terkontaminasi, yang menyebabkan risiko kesehatan yang tinggi bagi masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah menggulirkan beberapa program penyediaan air bersih, distribusi air yang merata dan berkualitas masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan, yang sering kali kurang memadai dan tersebar jauh dari pusat-pusat pemukiman. Ini mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyakit yang dapat dicegah, terutama di daerah pedalaman.

Pembangunan wilayah mandiri yang menjadi tujuan utama otonomi daerah juga terhambat oleh kurangnya fasilitas yang mendukung pemberdayaan masyarakat setempat. Untuk mewujudkan wilayah mandiri, diperlukan integrasi antara pengembangan

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, meskipun potensi alam yang melimpah, seperti sektor pertanian dan kehutanan, belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat belum sepenuhnya diberikan kesempatan untuk mengelola potensi tersebut, terutama karena kurangnya pelatihan dan akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat dan ketergantungan pada bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam penelitian sebelumnya, beberapa studi telah membahas masalah serupa terkait infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil di Indonesia, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji kondisi di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai contoh, penelitian oleh Sari dan Setiawan (2023) mengidentifikasi bahwa ketidakmerataan distribusi infrastruktur dasar di wilayah pedalaman menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan publik dan menciptakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Namun, gap yang masih ada adalah kurangnya fokus pada Kabupaten Gunung Mas, yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menelaah lebih dalam tentang kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan pembangunan sosial dan pengembangan wilayah mandiri. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya melihat infrastruktur dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan data terkini dan pendekatan berbasis wilayah, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan baru yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas otonomi daerah di Kabupaten Gunung Mas.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan sosial dan pengembangan wilayah mandiri di Kabupaten Gunung Mas. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masyarakat Gunung Mas, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan infrastruktur dan dampaknya terhadap otonomi daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dan analisis data sekunder. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan yang memiliki pengetahuan terkait pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka mengenai kondisi infrastruktur yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sosial dan pengembangan wilayah di Kabupaten Gunung Mas.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis data sekunder, seperti dokumen perencanaan pembangunan daerah, laporan tahunan, dan data statistik yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas dan bagaimana

hal tersebut berhubungan dengan kualitas otonomi daerah.

Tahapan-tahapan kegiatan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan informan yang telah dipilih secara purposif. Selanjutnya, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Proses analisis ini dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang ada, kemudian menafsirkan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan.

Setelah proses analisis, hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan yang mengandung temuan-temuan penting terkait dengan peran infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan sosial dan pengembangan wilayah mandiri di Kabupaten Gunung Mas. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas dapat mendukung pembangunan sosial dan pengembangan wilayah mandiri. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan kunci dan analisis data sekunder, ditemukan berbagai temuan yang mengungkapkan tantangan dan potensi dalam mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas.

Deskripsi Infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas saat ini masih memiliki kekurangan signifikan dalam hal aksesibilitas dan kualitas. Banyak desa yang belum terhubung dengan jalan yang

memadai, yang menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa kepala desa yang menyatakan bahwa akses ke jalan raya utama masih terbatas, yang mempengaruhi arus barang dan jasa di wilayah tersebut. Tanpa adanya jalan yang baik, pengembangan ekonomi lokal dan aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi sangat sulit.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang buruk. Bahkan, beberapa desa terisolasi dalam beberapa bulan setiap tahun akibat banjir yang melanda. Ketidakstabilan infrastruktur dasar ini turut berperan besar dalam rendahnya kualitas hidup di daerah tersebut. Menurut Soejoto (2019), infrastruktur yang buruk seringkali menghambat mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, yang mengarah pada kesenjangan sosial yang lebih besar.

Komparasi hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara wilayah yang memiliki aksesibilitas infrastruktur yang baik dan wilayah yang terisolasi. Di wilayah yang lebih mudah dijangkau, kualitas pendidikan dan kesehatan jauh lebih baik. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Widodo (2020), yang menyebutkan bahwa infrastruktur yang memadai adalah faktor penentu dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah.

Deskripsi Akses Air Bersih di Kabupaten Gunung Mas juga menunjukkan salah satu masalah yang sangat signifikan, yaitu keterbatasan akses terhadap air bersih. Banyak desa yang masih mengandalkan sungai sebagai sumber utama air minum, meskipun air tersebut sering tercemar. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa program penyediaan air bersih yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah belum mampu menjangkau seluruh

masyarakat. Beberapa daerah bahkan terpaksa bergantung pada bantuan air dari pihak luar untuk memenuhi kebutuhan dasar ini.

Sumber air yang terkontaminasi menyebabkan tingginya angka penyakit terkait air di wilayah tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang paling rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh air kotor. Sebagaimana diungkapkan oleh Hidayat dan Lestari (2023), infrastruktur air bersih yang tidak memadai berpotensi menimbulkan krisis kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Perbandingan dengan daerah lain yang memiliki infrastruktur air bersih yang lebih baik menunjukkan bahwa kualitas hidup di wilayah tersebut jauh lebih baik. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur air bersih menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Jatmiko dan Santoso (2021) yang mengindikasikan bahwa akses air bersih berperan besar dalam pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.

Deskripsi Infrastruktur Kesehatan juga menjadi salah satu temuan utama dalam penelitian ini. Keterbatasan fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas membuat banyak masyarakat kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan petugas kesehatan setempat, diketahui bahwa fasilitas kesehatan yang ada tidak cukup memadai untuk melayani jumlah penduduk yang terus berkembang. Rumah sakit dan puskesmas yang ada sering kali kekurangan tenaga medis dan peralatan yang memadai. Sebagai contoh, di beberapa kecamatan, hanya ada satu puskesmas yang harus melayani lebih dari seribu orang.

Kondisi ini berisiko menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyebaran penyakit yang dapat dicegah. Infrastruktur kesehatan yang terbatas juga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang memadai. Hasil ini mendukung pandangan yang disampaikan oleh Kurniawan dan Sulistyani (2022), yang menekankan pentingnya keberlanjutan infrastruktur kesehatan untuk mendukung pembangunan sosial di daerah-daerah terpencil.

Komparasi dengan daerah lain menunjukkan bahwa daerah yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik memiliki angka kematian yang lebih rendah dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai otonomi daerah yang berkualitas.

Deskripsi Pemberdayaan Masyarakat mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan wilayah mandiri di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, terungkap bahwa sebagian besar program pemberdayaan yang ada belum cukup melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap proyek-proyek yang ada, yang pada gilirannya mengurangi dampak positif dari program tersebut.

Program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung memiliki potensi yang lebih besar dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber daya alam lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan penelitian oleh Putri dan Widiastuti (2020), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat yang efektif dapat mendorong pengembangan wilayah mandiri dengan memaksimalkan potensi lokal. Hal ini dapat mempercepat proses transisi menuju daerah yang mandiri secara ekonomi, seperti yang telah diterapkan di daerah lain yang memiliki program pemberdayaan yang lebih terstruktur (Rahmawati, 2022).

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di daerah tersebut. Namun, berdasarkan wawancara dengan pejabat pemerintah, kebijakan-kebijakan ini sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak. Program yang sudah ada juga belum sepenuhnya mencakup seluruh daerah yang membutuhkan, terutama wilayah pedalaman.

Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini terletak pada keterbatasan sumber daya dan dukungan politik yang tidak merata di seluruh daerah. Penelitian oleh Arifin dan Pratama (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak terkoordinasi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan pembagian yang tidak adil.

Dalam komparasi dengan daerah lain yang berhasil dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur, penting untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih terarah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas di Kabupaten Gunung Mas.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar yang tidak memadai di Kabupaten Gunung Mas telah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan aksesibilitas, terutama terkait dengan kondisi jalan yang buruk, yang menyebabkan terbatasnya mobilitas barang dan orang. Meskipun beberapa program perbaikan infrastruktur telah dilaksanakan, distribusi infrastruktur yang tidak merata menjadi faktor penghambat utama bagi pengembangan ekonomi dan sosial di daerah ini.

Selain itu, masalah akses air bersih juga menjadi tantangan besar di Kabupaten Gunung Mas. Sebagian besar desa di wilayah tersebut masih mengandalkan sungai sebagai sumber utama air minum, yang sering tercemar. Program penyediaan air bersih yang ada belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, yang berisiko pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan angka penyakit yang berhubungan dengan air. Oleh karena itu, infrastruktur air bersih perlu menjadi prioritas dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keterbatasan fasilitas kesehatan juga berkontribusi pada rendahnya kualitas hidup di Kabupaten Gunung Mas. Rumah sakit dan puskesmas yang ada tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang. Dengan terbatasnya tenaga medis dan peralatan kesehatan, banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan perawatan yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur kesehatan yang merata sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah.

Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas masih terbatas, dengan banyak program yang belum melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini mengurangi rasa memiliki terhadap proyek-proyek yang ada dan menghambat dampak positif yang diharapkan dari kegiatan pemberdayaan. Untuk itu, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan untuk menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan.

Dari hasil penelitian ini, dapat disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antar lembaga serta memperhatikan kebutuhan infrastruktur dasar yang lebih merata. Program pembangunan harus lebih terarah dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam mengenai dampak langsung dari pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunung Mas, dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data yang lebih komprehensif.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Berisi Informasi ucapan terima kasih serta penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Penelitian yang dilakukan. Bisa kepada institusi penyedia anggaran maupun hibah (mencantumkan sumber dan skema hibah yang digunakan), pihak institusi tempat kegiatan Penelitian dilakukan, narasumber, organisasi dan unsur masyarakat, serta sivitas akademika yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Penelitian.

### **REFERENSI**

- Ahmad, M. (2020). *The Impact of Infrastructure on Regional Development in Indonesia: A Case Study of Rural Areas*. Jakarta: Indonesia Infrastructure Press.
- Alamsyah, A. (2021). *Evaluating the Role of Public Services in Rural Development*. Yogyakarta: Rural Development Publishing.
- Amri, S., & Harahap, R. (2022). *Challenges in Implementing Infrastructure Development in Remote Areas of Indonesia*. Journal of Development Studies, 16(3), 45-59.
- Arifin, Z., & Pratama, R. (2023). *The Role of Local Government in Enhancing Infrastructure and Social Development*. Bandung: West Java Publisher.
- Aziz, F. (2020). *Poverty and Infrastructure in Rural Communities*. Journal of Indonesian Economics, 12(1), 22-30.
- Damanik, P., & Salim, A. (2022). *Local Development and Governance in Kalimantan*. Kalimantan Development Review, 9(2), 103-118.
- Dwijaya, R. (2021). *Infrastructure and Economic Development in Indonesia's Rural Areas*. Indonesian Journal of Economics, 18(4), 100-112.
- Gunawan, B. (2020). *Infrastructure Development and Social Welfare in Remote Areas*. Jakarta: Social Welfare Publishing.
- Haryanto, M. (2022). *Barriers to Regional Development in Kalimantan: A Focus on Gunung Mas*. Kalimantan Economic Journal, 7(1), 56-74.
- Hidayat, R., & Lestari, T. (2023). *Public Services and Infrastructure for Sustainable Regional Growth in Indonesia*. Jakarta: Sustainable Development Books.

- Iskandar, A., & Kurniawan, E. (2021). *The Link Between Infrastructure and Regional Independence in Eastern Indonesia*. *Regional Development Review*, 5(2), 89-100.
- Jatmiko, F., & Santoso, D. (2021). *Water Supply and Sanitation Challenges in Indonesian Rural Areas*. *Indonesian Journal of Environmental Health*, 14(2), 10-18.
- Kurniawan, R., & Sulistyani, L. (2022). *Improving Infrastructure to Support Sustainable Development in Kalimantan*. *Journal of Regional Studies*, 11(3), 55-66.
- Nuryanti, W., & Anwar, H. (2021). *Rural Development and Governance: Lessons from Kalimantan*. *Journal of Indonesian Politics*, 8(1), 45-58.
- Putri, E., & Widiaستuti, P. (2020). *Challenges in Remote Area Infrastructure and its Impact on Local Economy*. *Economic Research Review*, 14(2), 102-115.
- Rahmawati, A. (2022). *Infrastructure and Development in Indonesian Villages*. *Journal of Rural Development*, 19(1), 22-35.
- Sari, D., & Setiawan, S. (2023). *Infrastructure Gaps in Rural Indonesia: A Case Study on Remote Villages in Kalimantan*. *Journal of Development Research*, 21(4), 45-60.
- Setiawan, A., & Sari, N. (2020). *Improving Rural Infrastructure through Community-Based Approaches*. *Journal of Social Development*, 17(3), 77-88.
- Sumardi, J., & Hartono, T. (2021). *The Role of Government in Rural Infrastructure Development*. *Indonesian Journal of Public Administration*, 13(2), 65-74.
- Widodo, B. (2020). *Community Empowerment and Infrastructure Development in Remote Areas*. *Journal of Community Development*, 6(2), 33-42.